



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Ayu Andira

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: Ayuandira092024@gmail.com

ABSTRACT

Stunting is a condition in which toddlers have less length or height when compared to their age. Stunted toddlers in the future will have difficulty in achieving optimal physical and cognitive development. In this case, the role of the village government is urgently needed in reducing stunting. This research was carried out in Rawang Binjai village, Pangean District, Kuantan singing district. The purpose of this study is to find out the Role of the Village Government in Accelerating Stunting Reduction in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The theory used is According to Ryaas Rasyid (in Charisma Listiani 2021). Which has several indicators, namely the Role of Facilitator, Role of Dynamismator, and Role of Regulator. The research methods used by the author in this study are quantitative descriptive methods, data collection methods used questionnaires, observations, and documentation. The sampling technique uses a saturated sampling technique where all populations are sampled. The results of the study show that the role of the village government in accelerating stunting reduction in Rawang Binjai village produces an average score of 3.83 which is in the Good interval.

Keywords: *The role of village governments in reducing stunting.*

ABSTRAK

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam penurunan stunting. Penelitian ini dilaksanakan di desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam percepatan Penurunan Stunting Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan yaitu Menurut Ryaas Rasyid (dalam Charisma Listiani 2021). Yang memiliki beberapa indikator yaitu Peran Fasilisator, Peran Dinamisator, dan Peran Regulator. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

kuantitatif, Metode pengumpulan data yang digunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di desa Rawang Binjai menghasilkan nilai rata-rata 3,83 yang berada pada interval Baik. hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, fasilitator, dinamisator dan Regulator menunjukkan semua indikatornya Baik.

Kata kunci: Peran pemerintah desa Dalam penurunan Stunting.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mewujudkan generasi emas tahun 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke 100 tahun nantinya Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki cita-cita akan adanya peningkatan dalam kesejahteraan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka diperlukanlah keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 adalah 0.718 menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi, peringkat 107 dari 189 negara. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan IPM Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang meningkat 37.3% (UNDP 2020).

Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada balita yang disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama/ kronis dan infeksi berulang (Purwati, 2021). Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang Panjang tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Stunting ditegakkan setelah anak berusia 2 tahun, setelah anak berusia 2 tahun intervensi dan koreksi yang dilakukan tidak akan berhasil secara optimal, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dalam menurunkan prevalensi stunting sejak dini di Indonesia.

Stunting dan permasalahan kekurangan gizi lain yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi



akibat ketidak mampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. Stunting dapat terjadi sejak anak dalam kandungan atau setelah kelahiran.

Suhro & Pradana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagai pemerintahan tingkat dasar memiliki peran penting untuk mengurangi kasus stunting. Salah satunya dengan upaya membangun kerjasama antara pemerintah desa, bidan desa serta remaja setempat untuk membentuk suatu program yang mengarah pada menurunkan stunting.

Peran Pemerintah desa diharapkan mampu mengontrol terjadinya stunting pada balita dengan berperan aktif dalam percepatan penurunannya. Pemerintah desa membuat kebijakan-kebijakan yang akan membantu penurunan resiko stunting seperti pembentukan kader posyandu, kader Pembangunan Manusia, dan kader tim pendamping keluarga, makanan tambahan untuk anak resiko stunting. Ini bisa membantu pemerintah desa dalam proses percepatan penurunan stunting di desa. Kejadian stunting terkait erat dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita melalui program-program yang relevan dengan kondisi Masyarakat.

Desa Rawang Binjai, sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangean, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Pada tahun 2024 Desa Rawang Binjai menjadi Desa angka stunting Tertinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius untuk di tangani lebih cepat, agar angka stunting dapat turun Dimana hanya 14% targetnya. Anak yang beresiko stunting di desa Rawang binjai, dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan ibu disaat hamil dan kurang pengeedukasian tentang resiko stunting kepada para remaja dan pasangan usia subur dan ibu hamil sehingga para calon ibu kurang mengetahui wawasan terkait faktor dan resiko stunting, Serta kurangnya sarana prasarana penurunan stunting seperti air bersih dan jamban yang sehat, yang membuat lingkungan menjadi kurang sehat. Ditambah lagi bidan desa yang sudah pindah domisi yang biasanya tinggal di desa Rawang Binjai sekarang sudah pindah domisili ke kecamatan benai meskipun tetap mejadi bidan desa namun secara aktif tidak bisa lagi memantau secara rutin perkembangan stunting di desa. Kondisi ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat untuk itu perlu peran pemerintah desa untuk menurunkan pervelensi angka stunting di desa Rawang Binjai ini. Berikut ini data Stunting lima tahun Terakhir Di desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1 Data Stunting Desa Rawang Binjai

No	Tahun	Ibu Hamil	Anak Usia 0-59 bulan	Jumlah Anak Stunting
1	2020	12	39	7
2	2021	8	34	7
3	2022	10	38	9
4	2023	6	42	7
5	2024	3	40	17

Sumber : Poskesdes Desa Rawang Binjai 2025



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Dari tabel diatas dapat dilihat angka stunting Didesa Rawang Binjai pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 ibu hamil 12 orang, anak usia 0-59 bulan 39 dengan jumlah stunting 7 orang. Tahun 2021 ibu hamil 8 orang, anak usia 0-59 bulan 34 orang dengan jumlah stunting tetap 7 orang tidak ada perubahan. Tahun 2022 ibu hamil 10 orang jumlah anak 0-59 bulan 38 orang dengan jumlah stunting meningkat menjadi jumlah 9. Pada tahun 2023, ibu hamil 6 orang, anak 0-59 bulan 42 orang, untuk angka stunting mengalami penurunan pada tahun 2023 dari 9 orang anak stunting menjadi 7 orang anak. Dan pada tahun 2024 ini angka stunting sangat tinggi melonjak menjadi 17 orang, dengan jumlah ibu hamil 3 orang anak 0-59 bulan 40 orang. Ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah desa untuk lebih memperhatikan angka stunting agar tidak meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti tingginya angka stunting ini di akibatkan kurang berperannya pemeritah desa dalam penurunannya. Hal ini tentu harus menjadi prioritas pemerintah untuk menanganinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Peran Pemerintah Desa Dalam Percepatan penurunan Stunting di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini akan memberikan sumbangsi saran dalam bidang pemerintah Desa dan Bidang Administrasi Negara.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil Penelitian ini Diharapkan Akan memberikan manfaat dan diterapkan oleh Masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.

1.4.2 Secara Akademis



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Hasil Penelitian ini Juga Diharapkan sebagai ibahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa yang akan datang.

Landasan Teori

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/konsep Ilmu administrasi Negara

Secara *etimologis* admistrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrate* yang berarrti "*to serve*" yang berarti melayani dan atau memenuhi serta *administrasio* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pengelolaan dan pemerintahan. Sedangkan administrasi dari bahasa Belanda "*administratie*" yang berarti segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengertik, komputerisasi, surat menyurat, kearsiapan agenda. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Anggara Sahya, 2014).

Menurut Ali Faried (2015:23) Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan Bersama.

Menurut Pasolong (2016:8) administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Pasolong (dalam Mulyadi, 2016:33) administrsi public merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrsi publik dimaksud untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakn terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

2.1.2 Teori/Konsep kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Menurut Irfan Islamy Dalam Sitna Hajar Malawat (2022) kebijakan publik serangkaian Tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan



oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh Masyarakat.

2.1.3 Teori/Konsep Organisasi

Istilah organisasi diambil dari bahasa Yunani yaitu *organon* yang berarti alat. Disini dapat dilihat bahwa organisasi adalah sebuah alat administrasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siregar, dkk 2022).

Organisasi dapat dinggap sebagai sebuah wadah, sebuah proses, serta sebuah sistem yang dipandnag sebagai alat agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli dalam sebuah organisasi terdapat beberapa unsur, seperti unsur kerja sama, orang atau anggota yang bekerja sama, serta unsur tujuan bersama yang telah ditetapkan untuk dicapai. Pada umumnya organisasi di anggap sebagai sebuah sitem terbuka. Dari sini dapat diartikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan yang pada dasarnya memiliki tujuan umum sehingga terdapat keluaran dan masukan (Anggoro, dkk, 2022).

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi privat/swasta. Organisasi publik adalah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat atau swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik adalah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan bekerja berdasarkan Undang-undang. Dalam Negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2020) dalam suatu Negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian sebagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Organisasi (dalam Faried Ali, 2015:28) merupakan wujud *conscience collective* (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan.

Adapun ciri-ciri organisasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- b. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
- c. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga



organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Unsur-unsur organisasi secara umum:

1. Man, adalah unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personal atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pimpinan (*administrator*) sebagai pemimpin tertinggi organisasi, para manajer pemimpin unit tertentu suatu kerja sesuai fungsinya dan para pekerja setiap hal tersebut merupakan kekuatan organisasi.
2. Kerja sama, adalah unsur organisasi dimana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama.
3. Tujuan bersama, adalah sasaran yang ingin dicapai atau diharapkan dapat terlaksana dengan baik.
4. Peralatan (*equipment*), adalah sarana dan prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut baik itu berupa bangunan, materi, uang, dan kelengkapan lainnya.
5. Lingkungan (*Environment*), adalah unsur organisasi yang memiliki pengaruh. Faktor tersebut adalah ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijaksanaan, anggaran dan peraturan yang telah ditetapkan.
6. Kekayaan alam, yang termasuk dengan kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora dan fauna.
7. Kerangka/konstruksi mental organisasi, adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat.

Komponen dasar struktur organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pembagian tugas pada individu (bagian)
2. Hubungan pelaporan resmi, hirarki, rentang kendali.
3. Pengelompokan individu menjadi bagian organisasi.
4. Sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integrasi, vertikal maupun Horizontal

Manfaat organisasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Tercapainya sebuah tujuan.
- b. Melatih mental bicara dipublik.
- c. Mudah memecakan masalah.
- d. Melatih *leadership*.
- e. Mampu mengatur waktu dengan baik.

2.1.4 Teori/ Konsep Pemerintah Desa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Pengertian pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), structural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi).

Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

’Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau ang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

2.1.5 Teori/Konsep Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014).

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam. Menurut (Ryaas Rasyid, Dalam Charisma Listiani 2021). maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan Pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk Memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variable yang merupakan hubungan sebab akibat. Menurut Soerjono (Dalam Charisma Listiani 2021) Peranan adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

Peranan seorang pemimpin di Desa merupakan kunci penting dalam berjalannya pemerintah desa guna mencapai pelayanan yang prima dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa serta membina kemasyarakatan desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 bahwa tugas kepala desa ialah kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

2.1.6 Konsep Pelayanan Publik

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan public yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Suyadi (2015) pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umumnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.7 Teori/Konsep Stunting

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Balita pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur bila dibandingkan dengan standar baku WHO, nilai Zscorenya kurang dari -2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Zscorenya kurang dari -3 SD (Kemenkes, RI 2016).

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya. Penghitungan ini menggunakan standar Z score dari WHO. Normal, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek).

2.1.8 Teori indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) pertama kalinya diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala melalui laporan tahunan Human Development Report (HDR). Menurut UNDP (2007) IPM merupakan suatu proses dalam memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*"a process of enlarging people's choices"*). Pada dasarnya konsep dari indeks pembangunan manusia yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi baik dari segi fisik, mental, maupun secara spiritual. Indeks pembangunan manusia memiliki nilai antara 0-100, dan memiliki tiga dimensi pengukuran IPM yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama (RLS). Dimensi standar hidup yang layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah) (BPS, 2021a).

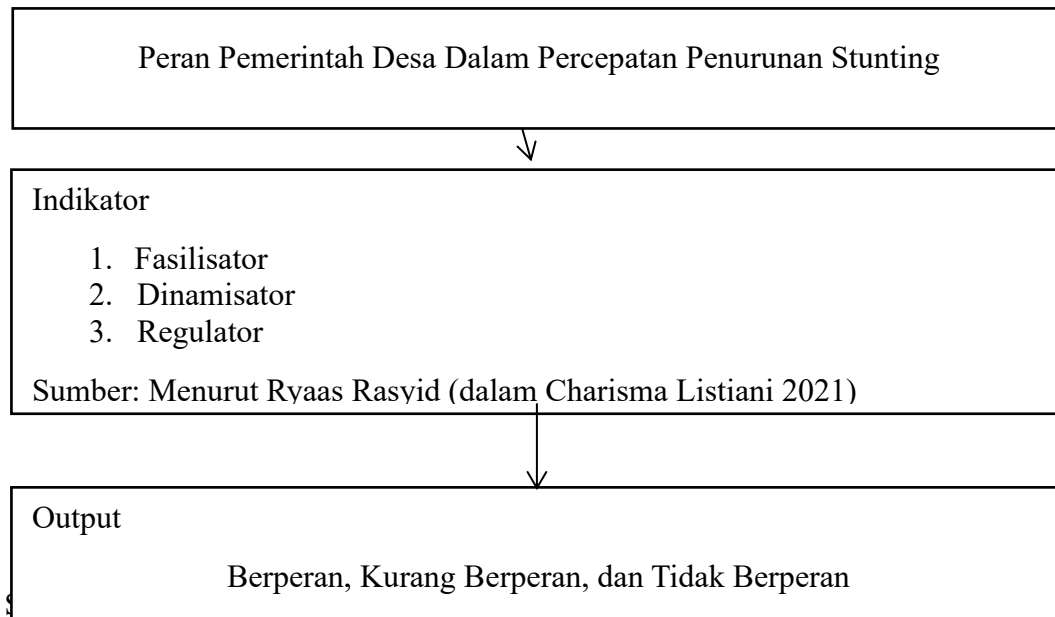
Badan Pusat Statistik (2022) Indeks pembangunan manusia merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dibangun dengan tiga pendekatan dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk dimensi pengetahuan diukur dengan gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup yang layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian



Kerangka berfikir tentang “Peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan Stunting Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi “ sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



2.3 Defenisi Operasional

Untuk Memudahkan dalam Menganalisis Penelitian, maka berikut ini di jelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Pemerintah Desa sebagai fasilitator
Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunann untuk menjembatani berbagai kepentingan Masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
2. Pemerintah Desa sebagai Dinamisator.
Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bibimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Pemerintah desa sebagai regulator
Peran Pemerintah sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan



pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran pemerintah desa sebagai regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di Tingkat desa. Regulasi stunting dibuat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting. adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada Masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2.4 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Ryaas Rasyid (dalam Charisma Listiani 2021) peran pemerintah yang di maksud adalah pemerintah desa sebagai fasilitator, dinamisator dan Regulator.	Peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rawang Binjai kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi	Fasilitator	a. Sarana dan prasarana terkait stunting b. Adanya program-program penanganan stunting
		Dinamisator	a. Adanya sosialisasi tentang stunting b. Adanya pemberdayaan atau edukasi yang dilakukan
		Regulator	a. Adanya peraturan-peraturan dalam penanganan stunting b. Adanya Berbagai upaya dalam penanganan stunting

Sumber: Modifikasi Penulis tahun 2025

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif



yang menggunakan pendekatan analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi serta analisis berdasarkan hitungan angka dan data-data yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut sugiyono (2016: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016: 90) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel untuk unsur ibu balita stunting maka penentuan sampel menggunakan sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2016: 96) Sampling Jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan jika jumlah populasi relative kecil.

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana di lihat pada tabel berikut ini:

Table 3.1 Populasi dan sampel penelitian peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	Bidan Desa	1	1	100 %
3	Kader Posyandu	3	3	100 %
4	Ibu Hamil	3	3	100 %
5	Ibu Balita stunting	17	17	100 %
Jumlah		24	24	

Sumber: Modifikasi Penulis 2025

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2016,308) data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari seseorang yang memberikan informasi (informan) yang merupakan tanggapan langsung Dari wawancara terhadap informan untuk penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data(melalui orang lain lewat dokumen). Jadi Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari



sumber-sumber pendukung selain Lokasi penelitian, yang dapat dilihat dari literatur-literatur, serta dokumen dokumen yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

3.4 Fokus penelitian

Adapun yang Menjadi fokus Penelitian ini yaitu melihat peran Pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rawang Binjai kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing.

3.5 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan alasan peneliti melihat masih terdapat beberapa permasalahan mengenai penanganan stunting terhadap orangtua atau anak di Desa Rawang Binjai ini.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2016: 162). Kuesioner atau angket adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.6.2 Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2015), Observasi adalah proses yang pelik, proses yang terangkai dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati Peran Pemerintahan desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) Dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa lampau atau yang sudah berlalu.

Menurut Sudaryono (2019) Mendefinisikan dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian, seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, film documenter, dan data penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Semua Data yang Diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{N}{F}$$

Keterangan :

$\bar{X}$ = Rata – rata



N = Bobot
 F =Jumlah Responden

Setelah data diolah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Banyak Kelas Interval

Dimana:

Rentang = Nilai Tertinggi-Nilai Terendah

Banyaknya Kelas Interval = 5

$$\text{Panjang kelas Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sangat baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 4,20-5,00

Baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 3,40-4,19

Cukup Baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 2,60-3,39

Kurang Baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,80-2,59

Tidak Baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,00-1,79.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam percepatan Penurunan Stunting didesa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi Hasil tanggapan responden mengenai peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di desa Rawang Binjai kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat di lihat pada tabel Berikut ini :

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Fasilitator	2	16	6	0	0	24	3,85
2.	Dinamisator	1	18	5	0	0	24	3,78
3.	Regulator	1	19	4	0	0	24	3,87
Jumlah		4	53	15	0	0	24	3,83
Jumlah Responden		1	18	5	0	0	24	
Persentase		4	75	21	0	0	100	



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sumber : Data olahan penulis 2025

Dari tabel 5.14 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah pada indikator Fasilitator, dinamisator dan Regulator pada kategori Sangat Baik sebanyak 1 orang (4%) responden, kategori Baik sebanyak 18 orang (75%) responden, kategori Cukup Baik sebanyak 5 orang (21%) responden. Maka secara rata-rata adalah 3,83. Dari 3 indikator diatas semua rata-rata berada pada interval Baik dan jika dirata-ratakan keseluruhan indikator dibagi 3 jumlah indikator maka hasilnya interval nya Baik.

Indikator fasilitator, mengenai sarana dan prasarana dalam percepatan penurunan stunting di desa Rawang Binjai dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,85 yang berada pada interval Baik, yang mana pemerintah desa sudah memberikan sarana dan prasaran dalam penurunann stunting di Desa Rawang Binjai. Manfaat dari sarana dan prasarana ini hendaknya dapat menunjang kinerja para kader dan bidan bidan desa serta perangkat desa dalam mencegah stunting di desa. Tidak hanya itu para sasaran stunting seperti ibu hamil dan ibu balita juga harus berperan aktif dalam membantu menurunkan angka stunting.

Indikator Dinamisator, mengenai bimbingan dan pengarahan seperti sosialisasi dan pemberdayaan serta edukasi terkait stunting di desa Rawang Binjai dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,78 yang berda pada interval Baik. Dimana dinamisator ini telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada ibu balita dan kader sebagai Upaya percepatan penurunan stunting di desa Rawang Binjai. Namun pemerintah desa harus lebih meningkatkan sosialisasi ini tidak hanya sasaran prioritas saja tapi harus seluruh Masyarakat menegetahui tentang stanting ini agar mereka dapat mencegah terjadi di keluarganya.

Indikator Regulator mengenai percepatan peneurunan stunting di Desa Rawang Binjai melalui sebaran kuesioner di dapat nilai rata-rata 3,87 yang berada pada interval Baik, Dimana peran Regulator merupakan menyiapkan arah kedepannya untuk penanganan stunting melalui menerbitkan aturan-aturan terkait penanganan stnting yang lebih baik agar angka stunting bebar-benar dapat di Atasi. Pemerintah sebagai pemegang tonggak utama dalam hal pembuatan aturan ini hendaknya melakukan Upaya-upaya yang lebih baik lagi agar masalah stunting tidak lagi menjadi masalah utama di desa Rawang Binjai.

Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam percepatan penurunann stunting di desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk kategori Baik yang berada di interval 3,40-4,19. Hal ini di karenakan dari 3 indikator yang ada memang masih banyak kekurangan seperti yang penulis jelaskan di setiap indikator. Sehingga setiap indikator hanya pada kategori baik .



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rawang Binjai kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 3,83 yang pada interval Baik. Berarti peran pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting di desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik. Meskipun dari hasil observasi dan dokumentasi masih ada yang mengatakan kurang Baik karena angka stunting yang masih tinggi. Namun demikian dari 3 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu fasilitator, dinamisator dan regulator dari hasil sebaran kuesioner responden menjawab dengan kategori Baik.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah desa mampu memfasilitasi penanganan stunting dengan lebih baik lagi.
2. Pemerintah desa lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait stunting. Tidak hanya untuk perangkat desa saja.
3. Pemerintah desa membuat aturan yang relevan terhadap penanganan stunting

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara Sahya. 2015. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Anisa Fanria Ningsih, 2022. *Peran Dinas Kesehatan Dalam penanganan Dtunting di kecamatan Peranap Kab upaten Indragiri Hulu (studi kasus di Desa Batu Rijal Hilir)*.
- Anugraheni. 2012. *Faktor Resiko kejadian stunting Pada anak Usia 12-36 Bulan Di kecamatan Pati, Kabupaten pati*. Journal of.
- Anggoro, dkk. 2022. *MSDM Dalam Organisasi Konsep dasar Dan Aplikasi*. Bandung: widina Bakti Persada Bandung.
- Arini Hayati, F. F. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 bulan*.
- Ayunigtyas, 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Charisma Listiani, 2021. *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus stunting pada balita di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu*.
- Dartianis Haria, Dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo*.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar analisis kebijakan publik, edisi kedua*, Yogyakarta, Gajah Mada University Komputindo.
- Eyestone, Robert. 2014. *The therads of police a studi in police leadership*. IndianaPolis.
- Faried, Ali, 2015. *Teori dan konsep Administrasi, Dari pemikiran Pradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali press.
- Fitri. 2012. *Berat lahir sebagai factor Dominan Terjadinya Stunting Pada Balita (12-59 bulan) Se Sumatera(Analisis Data Riskesdas 2010)*. Universitas Indonesia.
- Ibrahim, Amin. 2014. *Teori dan konsep Pelayanan Publik*.
- Isna Wahyu Harmiyati Dan Rico Purnawandi Pane, 2021-2022. *Peran Desa dalam pencegahan Stunting di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kaputan Rokan Hulu Tahun 2021-2022. Jurnal of social science Research Vol.4 Nomor 3 Tahun 2024 pge 4784-4799*.
- Ipan, I Purnamasari H . 2021. *Collaborative Governance Dalam penanganan Stunting*. KINERJA, 18 (3): 383-391
- Julliyanti, El. K. 2022. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*
- Kasmiayah. 2014. *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelmbangunan. Jurnal Stuldi Ilmu Pemerintahan*.
- Kemetrian Kesehatan RI. 2016. *Laporan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Srikesnas) 2016*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan RI. 2018. *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian RI.
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Metodhs)*. Bandung: Alfabeta